

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R, 2000, “Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternatif” hlm. 15-17, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Devas, N, 1989,” Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia ”, hlm. 61-97, Uf Press, Jakarta;
- Gaffar, A, 2000,” Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang”, Wacana, Edisi 5 , hlm .33-46;
- Gaffar, A, 2000, “ Politik Indonesia , Transisi menuju demokrasi “, hlm. 158 Pustaka Pelajar Yogyakarta;
- Halim, A, 2001,” Manajemen Keuangan Daerah “, hlm 72-73, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta;
- Kaho, Yosep Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, hlm.34-36, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Kaloh, J, 2002, “ Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab kebutuhan Lokal dan Tantangan Global” hlm. 3-10, PT. Rineka Cipta Jakarta;
- Kuncoro, Mudrajat, 1995, “ Desentralisasi Fiskal di Indonesia”, Prisma, Nomor 4, hlm. 3-17;
- Koswara, E, 2000,” Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya”, CSIS XXXIX No.1, hlm. 51-52;
- Mahi, R, 2000, “ Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi pemerataan antar daerah dan peningkatan efisiensi”, Analisis CSIS, XXIX, Nomor 1, hlm. 54-56;
- Mahfud, M, 1999, “ Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi” hlm. 270, Gama Media, Yogyakarta;



Mardiasmo, 2000, “ Paradikma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001”, Makalah Seminar MEP, Yogyakarta;

Mardiasmo, 2002, “ Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah” hlm. 102-103, Penerbit Andi, Yogyakarta;

Rasyid, Ryaas M, 1999,” Konsep Kebijakan dan Implekasi Politik dan Manajemen Pembangunan Otonomi Daerah”, Bahan Semi Loka Nasional, Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Ditjen PUOD Depdagri, Jakarta;

Reksohadiprojo, S, 1996 , Keuangan Negara (Ekonomi Publik) Teori dan Praktek, Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik, Volum1; hlm.74-78;

Suparmoko, 2002, “ Ekonomi Publik, Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah” hlm. 16,17, 21,34, Andi Offset, Yogyakarta;

Widjaja, H.A.W. 1998, “ Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia” hlm. 14, PT Rineka Cipta Jakarta.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246;